

## EVALUASI KEBIJAKAN PEMEKARAN DESA SIMBA RAYA KECAMATAN BINJAI HULU KABUPATEN SINTANG

Oleh:  
**Vetronela Erdawati Qyki**  
NIM. E42012035

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura  
dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2016

E-mail : [vetronelaqyki@gmail.com](mailto:vetronelaqyki@gmail.com)

### Abstrak

Penulisan Skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya konflik batas desa antara Desa Simba Raya Kecamatan Binjai Hulu dengan Kelurahan Kapuas Kiri Hulu Kecamatan Sintang. Permasalahan lain yaitu pelayanan yang hanya dilakukan 2 (dua) kali dalam seminggu. Skripsi ini bertujuan untuk menilai hasil kebijakan pemekaran wilayah di Desa Simba Raya Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa implementasi kebijakan pemekaran wilayah di desa Simba Raya Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang cenderung dapat dianggap berhasil dengan mengacu pada 4 (empat) indikator terkecuali dalam hal pelayanan dan penataan desa khususnya penegasan dan penetapan batas wilayah.

Kata-kata kunci: Kebijakan Pemekaran Desa, Pelayanan, Pemberdayaan, Penataan, Dan Penyelenggaraan Pemerintahan.

### THE EVALUATION OF EXPANSION POLICY IN SIMBA RAYA RURAL BINJAI HULU SUB-DISTRICT SINTANG REGENCY

#### Abstract

This thesis was written based on the conflict on the based rural's boundary conflict between Simba Raya rural, Binjai Hulu and Kapuas Kiri Hulu village, Sintang. The other problem is the services are given about only two times every week. This thesis is aimed to assess the results of expansion policy in Simba Raya rural, Binjai Hulu, Sintang regency. The conclusion from this research is that the implementation of the expansion policy in Simba Raya village, Binjai Hulu, Sintang is considered successful by referring to the four (4) indicators exception in terms of service and structuring of the village, especially the affirmation and the determination of the territory.

*Keywords : Rural Expansion Policy, Service, Empowerment, Planning, and Good Governance Implementation.*

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Penelitian

Pemekaran wilayah dipandang sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan

memperoleh pelayanan bagi masyarakat. Pemekaran wilayah juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektifitas

penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan.

Pemekaran wilayah di Kabupaten Sintang dilakukan dengan mengingat luas wilayah kabupaten Sintang 21.638,20 KM<sup>2</sup> atau sekitar 14% dari luas Provinsi Kalimantan Barat dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi mencapai rata-rata 2,02% pertahun. Selain itu prasarana transportasi jalan darat yang belum memadai antar wilayah menyebabkan pelayanan desa kepada masyarakat tidak maksimal disertai dengan rentang kendali pemerintahan desa yang sangat luas. Kondisi geografis yang berjauhan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya seperti dari ibukota kabupaten ke kecamatan, ibukota kecamatan ke desa maupun antar desa.

Sementara pemekaran desa di kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 tahun 2007. Pemekaran desa tersebut merupakan upaya memberikan pelayanan dan mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa secara terpadu, tepat guna, dan berkesinambungan serta dalam rangka

penataan desa yang lebih efektif dan efisien dalam wilayah kecamatan di Kabupaten Sintang.

Salah satu desa yang dimekarkan yaitu Desa Dak Jaya berdasarkan atas pertimbangan bahwa luas wilayah yang sangat luas serta jumlah penduduk dan potensi desa sudah sesuai dengan persyaratan untuk di mekarkan. Kemudian memudahkan pelayanan kepada masyarakat, terutama keinginan pemekaran desa ini berasal dari masyarakat. Usulan tersebut menghasilkan surat rekomendasi dari kecamatan Binjai Hulu oleh Camat Binjai Hulu demi kelancaran proses pemekaran.

Sebelum terjadi pemekaran Desa Dak Jaya terdiri dari Empat Dusun yaitu Dusun Sidodadi, Dusun Sumberjo, Dusun Sandung, dan Dusun Simba. Secara keseluruhan luas wilayah Desa Dak Jaya sebelum dimekarkan yakni 12.500 ha dengan jumlah penduduk 2.711 Jiwa dan 738 KK. Batas wilayah Desa Dak Jaya antara lain sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ampar Bedang, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Binjai Hulu, sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mensiku, dan sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kapuas Kiri Hulu Sintang (Sungai Kapar).

Setelah Desa Dak Jaya dimekarkan menjadi Desa Dak Jaya (Desa Induk) dan Desa Simba Raya maka luas wilayah di Desa Simba Raya  $\pm$  6.000 Ha. Pada hari Senin tanggal Dua Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Tujuh diadakan kesepakatan penetapan batas wilayah di Desa Simba Raya dalam bentuk buatan (dari semen) dengan nomor pilar di Tinting Tebedak dan di Sungai Kapar. Hasil penetapan batas wilayah tersebut yaitu sebelah timur berbatasan dengan Desa Ampar Bedang, sebelah barat dengan kelurahan Kapuas Kiri Hulu atau di singkat KKU Kecamatan Sintang, sebelah utara dengan Desa Dak Jaya, dan sebelah selatan dengan desa Ampar Bedang.

Berdasarkan peta bahwa secara administrasi Desa Simba Raya sudah ditetapkan batas wilayahnya, namun kondisi yang terjadi yaitu masih terdapat isu konflik batas desa antara desa Simba Raya dengan Kelurahan Kapuas Kiri Hulu atau KKU Kecamatan Sintang. Permasalahan tersebut masih terus berlanjut hingga saat ini dan belum mendapat penyelesaian dari pemerintah daerah Kabupaten Sintang. Sementara masyarakat menuntut adanya kejelasan tentang batas desa dengan kelurahan dua kecamatan tersebut.

Kemudian berdasarkan pengamatan peneliti yang berkaitan dengan sektor lain seperti pelayanan kepada masyarakat masih kurang maksimal. Setelah terjadi pemekaran di Desa Simba Raya, rentang kendali antara dusun dengan pusat desa maupun masyarakat dengan pusat desa lebih terjangkau namun pegawai desa hanya memberikan pelayanan kepada masyarakat 2 (dua) kali dalam seminggu. Pelayanan tersebut dilaksanakan pada hari senin dan hari rabu pada jam kerja.

Selanjutnya jarak tempuh antar dusun dengan pusat desa semakin lebih dekat sehingga memudahkan masyarakat untuk berinteraksi dengan pemerintah desa. Pembangunan wilayah juga semakin merata walaupun masih berjalan sedikit lamban dibuktikan melalui akses lalu lintas seperti jalan pintas antar dusun yang sangat membantu masyarakat setempat untuk saling berinteraksi. Tingkat ekonomi masyarakat masih standar namun sudah lebih maju dari sebelum pemekaran. Lahan pertanian yang dimiliki oleh Desa Simba Raya antara lain adalah lahan sawah 2 (dua) Ha, pertanian lahan kering 2 (dua) Ha, kebun karet lokal 1 (satu) Ha, dan kebun karet unggul 1 (satu) Ha.

Fenomena lain yaitu bahwa ketika akan dimekarkan oleh Desa Dak Jaya melalui kesepakatan bersama bahwa nama desa pemekaran tersebut adalah Desa Simba Jaya. Selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, desa hasil pemekaran tersebut menggunakan label nama desa dengan nama Desa Simba Jaya. Namun ketika masyarakat membuat surat menyurat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang bahwa dikeluarkan surat dengan label nama Desa Simba Raya. Hal tersebut sempat menjadi kontroversi dan perdebatan di Desa Simba Raya. Sehingga masih banyak *plank - plank* gedung yang menggunakan Desa Simba Jaya dan sudah ada juga yang berubah nama menjadi Desa Simba Raya.

## 2. Rumusan Permasalahan

Agar penelitian menjadi lebih mudah dan memiliki arah yang jelas, maka terlebih dahulu dirumuskan permasalahannya. Dari latar belakang dan fokus penelitian, maka rumusan permasalahan ini adalah Seberapa berhasilkah kebijakan pemekaran wilayah di Desa Simba Raya Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang mencapai tujuan yang telah ditetapkan ?

## 3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, fokus penelitian, dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah ingin melakukan penilaian terhadap hasil (*outcomes of public policy implementation*) yang telah dicapai melalui pemekaran wilayah di Desa Simba Raya Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang.

## 4. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi ilmu pemerintahan yang terkait dengan evaluasi kebijakan. Kemudian sebagai bahan kajian pustaka bagi peneliti lain yang ingin meneliti permasalahan yang sama serta menambah panduan literatur dan bahan bacaan mengenai evaluasi kebijakan pemekaran desa.

### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini bermanfaat bagi pelaku penyelenggara kebijakan pemerintahan khususnya bagi pemerintah daerah Kabupaten Sintang sehingga dapat meminimalisir kesalahan yang

terjadi dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan selanjutnya demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta kemampuan berfikir guna menerapkan teori-teori yang diperoleh selama masa perkuliahan.

## B. TEORI DAN METODOLOGI

### 1. Teori

#### 1) Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Thomas Dye (dalam Subarsono 2011:2) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Menurut Subarsono bahwa konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik.

#### 2) Konsep dan Teori Evaluasi Kebijakan Publik

Dunn (dalam Nugroho, 2003:185) istilah evaluasi dapat

disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assessment). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi yang valid mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik, evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.

Jones (dalam Santosa, 2008:43) mengatakan bahwa evaluasi kebijakan adalah penilaian terhadap kemampuan pemerintah dalam proses dan programnya. Dalam menilai keberhasilan suatu kebijakan maka perlu dikembangkan beberapa indikator. Badjuri dan Yuwono (2003:138) mengatakan bahwa pengukuran evaluasi bervariasi sesuai dengan tipe evaluasinya. Tipe evaluasi kecocokan, efektivitas dan efisiensi mungkin memerlukan investigasi yang mendalam sebelum sampai pada kesimpulan akhir. Menurut Bridgman dan Davis (dalam Badjuri dan Yuwono 2003:138) walaupun pengukuran evaluasi tersebut bervariasi, secara umum evaluasi kinerja kebijakan tersebut mengacu pada empat indikator pokok

yaitu indikator *input, process, output* dan *outcomes*.

Kemudian Widodo (2010:112) menuliskan dalam bukunya bahwa evaluasi kebijakan publik dibedakan dalam dua macam tipe. *Pertama*, tipe evaluasi hasil (*outcomes of public policy implementation*) merupakan riset yang mendasarkan diri pada tujuan kebijakan. Ukuran keberhasilan pelaksanaan kebijakan adalah sejauh mana apa yang menjadi tujuan program dapat dicapai. *Kedua*, tipe evaluasi proses (*process of public policy implementation*), yaitu riset evaluasi yang mendasarkan diri pada petunjuk pelaksanaan (*juklak*) dan petunjuk teknis (*juknis*). Ukuran keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan adalah kesesuaian proses implementasi suatu kebijakan dengan garis petunjuk (*guide lines*) yang telah ditetapkan.

Dari indikator penilaian evaluasi terhadap kebijakan yang telah dikemukakan sebelumnya oleh pakar, peneliti menggunakan indikator evaluasi yang dikembangkan oleh Joko Widodo. Peneliti menggunakan tipe evaluasi hasil (*outcomes of public policy implementation*) yaitu riset yang mendasarkan diri pada tujuan kebijakan. Penelitian yang bertujuan

untuk melakukan penilaian terhadap hasil yang telah dicapai akan lebih tepat sasaran apabila diukur dengan menggunakan tipe evaluasi hasil.

### 3) Kebijakan Pemekaran

Adapun kriteria keberhasilan kebijakan pemekaran dapat dilihat apabila tujuan dari kebijakan pemekaran tersebut telah tercapai. Tujuan dari pemekaran tersebut antara lain yaitu: (1) Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat; (2) Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; (3) Pemberdayaan masyarakat; dan (4) Penataan desa.

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah komparatif dengan pendekatan kualitatif. Dalam hal ini, peneliti membandingkan keadaan sebelum dan sesudah diadakan pemekaran dengan menganalisis data yang diperoleh dari berbagai sumber dan informasi selama melakukan penelitian di lapangan. Kemudian peneliti mencari persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan dari hasil penelitian di Desa Simba Raya. Subjek penelitian yaitu Camat Binjai Hulu, Sekretaris Desa Simba Raya, Kaur Pemerintahan di Desa Simba Raya, Ketua BPD di Desa Simba Raya, Anggota PKK Desa

Simba Raya sebanyak 1 (satu) orang, Tim Pemekaran Desa Simba Raya sebanyak 2 (dua) orang, Tokoh Masyarakat desa induk sebanyak 1 (satu) orang, dan Tokoh Masyarakat Desa Simba Raya sebanyak 1 (satu) orang. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

### **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini ingin melakukan penilaian terhadap hasil (*outcomes of public policy implementation*) yang telah dicapai melalui pemekaran wilayah di Desa Simba Raya Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang yang kemudian akan peneliti bahas dengan menggunakan teori evaluasi yang dikembangkan Joko Widodo (2010).

#### **1. Indikator Penilaian Terhadap Kondisi Desa Simba Raya Sebelum Pemekaran**

##### **a. Mendekatkan Pelayanan Kepada Masyarakat**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelayanan yang dilaksanakan sebelum diadakan pemekaran cukup mengalami kendala. Pelayanan dari kecamatan yang ditujukan kepada desa terhambat, dikarenakan rentang kendali dan persebaran penduduk yang cukup luas di wilayah Kecamatan Binjai Hulu. Demikian pula pelayanan dari Desa Dak Jaya kepada dusun-dusun yang tersebar di wilayah Desa Dak Jaya termasuk Dusun Sandung menjadi terhambat karena rentang kendali yang cukup luas. Hal tersebut menyebabkan pelayanan kepada masyarakat menjadi terhambat.

##### **b. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan bahwa kondisi penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan sebelum pemekaran Desa Simba Raya belum memuaskan. Status Dusun Sandung yang jauh dari pusat Desa Dak Jaya menyebabkan Dusun Sandung kurang mendapatkan perhatian dari Desa Dak Jaya sehingga pembangunan untuk Dusun Sandung sendiri mengalami kendala. Berbeda dengan pandangan pihak Kecamatan yang merasa bahwa

sebelum pemekaran, pihak kecamatan tidak begitu merasa kesulitan untuk menangani desa yang tidak begitu banyak.

### **c. Pemberdayaan Masyarakat**

Berdasarkan keterangan dari beberapa informan saat diwawancarai oleh peneliti bahwa sebelum pemekaran, masyarakat di Dusun Sandung ikut berpartisipasi dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di desa induk. Namun, karena jarak yang cukup jauh dari pusat desa maka partisipasi masyarakat hanya seadanya dan sebisanya saja.

### **d. Penataan Desa**

Secara keseluruhan kondisi penataan desa sebelum pemekaran desa bahwa Desa Dak Jaya sebelum dimekarkan sudah mengalami permasalahan batas desa dengan Kelurahan Kapuas Kiri Hulu Kecamatan Sintang. Permasalahan tersebut karena berbeda persepsi antara masyarakat di Dak Jaya dengan masyarakat yang di Kelurahan Kapuas Kiri Hulu. Pihak Desa Dak Jaya khususnya masyarakat Dusun Sandung yang berbatasan langsung dengan Kelurahan Kapuas Kiri Hulu mempertahankan batas desa berdasarkan sejarah dari nenek moyang mereka. Sampai pada saat pemekaran Desa Simba Raya

permasalahan tersebut tetap berlanjut dan belum mendapat penyelesaian.

## **2. Indikator Penilaian Terhadap Kondisi Desa Simba Raya Setelah Pemekaran**

### **a. Mendekatkan Pelayanan Kepada Masyarakat**

Melalui hasil wawancara peneliti kepada beberapa informan terkait pelayanan setelah pemekaran bahwa pelayanan yang dilaksanakan di Desa Simba Raya sudah mudah dijangkau oleh masyarakat. Melalui pemekaran, masyarakat tidak perlu jauh-jauh untuk mendapatkan pelayanan berupa surat menyurat dan lain sebagainya. Pelayanan di Desa Simba Raya dilaksanakan dua kali dalam seminggu, tentunya waktu tersebut sangat terbatas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga masih ada masyarakat, dalam hal ini tokoh masyarakat yang masih belum puas dengan pelayanan yang diberikan oleh aparatur desa di Desa Simba Raya. Namun setelah pemekaran ini, pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih khusus untuk penduduk desa Simba Raya. Tentunya hal tersebut merupakan keuntungan bagi masyarakat setempat dalam hal

mendapatkan pelayanan dari aparatur desa.

#### **b. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan**

Dari hasil wawancara peneliti kepada beberapa informan terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa Simba Raya setelah pemekaran dapat dikatakan berhasil. Banyak pembangunan infrastruktur yang sudah di realisasikan pihak Desa Simba Raya. Pembangunan tersebut berupa jalan pintas antar dusun, lumbung padi, kantor desa, sumur air, jembatan dan jalan pertanian. Dengan demikian secara umum kondisi pembangunan di Desa Simba Raya dapat dikatakan berhasil.

#### **c. Pemberdayaan Masyarakat**

Melalui wawancara peneliti dengan beberapa informan tersebut bahwa pemberdayaan masyarakat di Desa Simba Raya tergolong baik. Masyarakat turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan – kegiatan desa. Sehingga setelah pemekaran di Desa Simba Raya semakin lebih baik terkait pemberdayaan masyarakatnya. Banyak kegiatan mandiri maupun gotong royong dari masyarakat di Desa Simba Raya. Selain itu memfungsikan PKK merupakan salah satu cara pemerintah desa

meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat di Desa Simba Raya.

#### **d. Penataan desa**

Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi bahwa penataan desa di Desa Simba Raya setelah pemekaran pada tahun 2007 sampai saat ini masih kurang baik. Konflik batas antara Desa Simba Raya Kecamatan Binjai Hulu dengan Kelurahan Kapuas Kiri Hulu (KKU) Kecamatan Sintang dari sebelum pemekaran hingga setelah pemekaran belum di selesaikan hingga saat ini. Namun batas dengan desa lain dalam wilayah Kecamatan Binjai Hulu khusus untuk Desa Simba Raya tidak terjadi konflik yang buruk dan sudah mendapat penyelesaian.

Permasalahan batas Desa Simba Raya dengan Kelurahan Kapuas Kiri Hulu masih diperjuangkan hingga saat ini. Sudah berkali – kali diadakan rapat namun selalu ada pihak yang tidak hadir dalam rapat tersebut. Masing-masing antara Desa Simba Raya dan Kelurahan Kapuas Kiri Hulu tetap mempertahankan batas sesuai persepsi mereka masing-masing.

### **3. Perbandingan Hasil Sebelum dan Setelah Pemekaran**

#### **a. Persamaan Kondisi Sebelum dan Setelah Pemekaran Desa Simba Raya**

Berdasarkan seluruh pernyataan yang sudah dijelaskan oleh informan – informan serta melalui pengamatan peneliti pada saat dilapangan bahwa terdapat persamaan sebelum dan setelah pemekaran di Desa Simba Raya. Adapun persamaan kondisi tersebut yaitu konflik batas desa antara Desa Simba Raya Kecamatan Binjai Hulu dan Kelurahan Kapuas Kiri Hulu atau KKU Kecamatan Sintang.

Sebelum pemekaran Desa Dak Jaya dahulu sudah terjadi konflik batas desa antara Desa Dak Jaya tepatnya di Simba atau Dusun Sandung di Kecamatan Binjai Hulu dengan Kelurahan Kapuas Kiri Hulu Kecamatan Sintang. Permasalahan tersebut sudah diajukan kepada pihak pemerintah kabupaten dan sudah berkali – kali diadakan pertemuan untuk menyelesaikan batas desa tersebut. Namun konflik batas desa antar kecamatan ini belum bisa diselesaikan karena berbagai kendala seperti ketidakhadiran beberapa pihak pada saat pertemuan rapat.

Setelah pemekaran masalah batas desa yang belum di selesaikan oleh desa induk ini masih terus berlanjut. Sehingga setelah pemekaran bukan lagi Desa Dak Jaya yang bermasalah dengan Kelurahan Kapuas Kiri Hulu, namun Desa Simba Raya sebagai desa pemekaran dari Desa Dak Jaya. Sampai saat ini masyarakat Desa Simba Raya yang berbatasan langsung dengan Kelurahan Kapuas Kiri Hulu masih terus memperjuangkan batas desa tersebut hingga mendapatkan penyelesaian dari pemerintah kabupaten.

#### **b. Perbedaan Kondisi Sebelum dan Setelah Pemekaran Desa Simba Raya**

Sebelum dan sesudah pemekaran Desa Simba Raya terdapat banyak perbedaan, baik berdasarkan pernyataan dan penjelasan dari informan maupun pengamatan peneliti saat penelitian di Desa Simba Raya. Sebelum pemekaran status Desa Simba Raya adalah Dusun Sandung dengan pusat desa di Desa Dak Jaya. Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan di Desa Dak Jaya dengan pelayanan yang sangat jauh dari Dusun Sandung.

Kondisi pelayanan sebelum pemekaran sangat menyulitkan pihak

Dusun Sandung karena jarak tempuh masyarakat yang sangat jauh. Pembangunan di Dusun Sandung juga hanya pembangunan balai dusun dan SD 1 (satu) lokal. Kemudian partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan juga tidak terlalu aktif disebabkan rentang kendali yang sangat jauh ditambah kondisi jalan poros yang rusak parah.

Setelah pemekaran Desa Simba Raya, pelayanan kepada masyarakat sudah semakin dekat walaupun hanya dilakukan 2 (dua) kali dalam seminggu. Masyarakat tidak perlu jauh – jauh untuk mendapatkan pelayanan berupa surat menyurat dan lain sebagainya dari pihak desa. Keadaan pembangunan juga sudah terlaksana dengan adanya kantor desa Simba Raya, jalan pintas antar dusun, sumur gali, lumbung padi, jembatan dan jalan pertanian. Selain itu kondisi setelah pemekaran dalam hal kemasyarakatan juga masyarakat semakin aktif dalam berbagai kegiatan. Di Desa Simba Raya sudah mengaktifkan kegiatan PKK yang dikelola oleh ibu – ibu PKK dengan berbagai kegiatan PKK tersebut.

#### D. SIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab V tentang hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemekaran Desa Simba Raya Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang dalam bidang pelayanan kepada masyarakat setelah diadakan pemekaran, sudah ada perubahan khususnya rentang kendali dalam pelayanan yang semakin dekat dengan masyarakat. Namun pelayanan dilakukan 2 (dua) kali dalam seminggu tentunya belum maksimal.
2. Pada bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa Simba Raya setelah pemekaran terlihat ada peningkatan. Penyelenggaraan pemerintahan semakin baik ditambah pembangunan infrastruktur pedesaan yang semakin ada peningkatan. Adapun hasil pembangunan yang sudah terlihat yaitu kantor desa, akses jalan pintas antar dusun, sumur gali, lumbung padi yang masih digunakan sebagai gedung serba guna, serta jalan pertanian.
3. Kondisi pemberdayaan masyarakat di Desa Simba Raya semakin dilakukan secara tepat guna, dimana banyak kegiatan yang melibatkan masyarakat. Salah satu kegiatan yang sangat menonjol di Desa Simba Raya yaitu kegiatan ibu – ibu PKK yang aktif

bergotong royong dalam berbagai kegiatan PKK. Apabila dibandingkan dengan keadaan sebelum pemekaran, partisipasi masyarakat Desa Simba Raya setelah pemekaran sudah semakin aktif.

4. Penataan desa di Desa Simba Raya setelah pemekaran desa khususnya pada penetapan dan penegasan batas desa masih mengalami kendala. Batas desa antara Desa Simba Raya Kecamatan Binjai Hulu dengan Kelurahan Kapuas Kiri Hulu Kecamatan Sintang masih terdapat konflik yang belum diselesaikan. Permasalahan tersebut sudah terjadi sejak sebelum pemekaran hingga setelah pemekaran. Masyarakat Desa Simba Raya masih terus memperjuangkan batas desa tersebut hingga mendapatkan keputusan dan penyelesaian dari pemerintah daerah Kabupaten Sintang.

## E. SARAN

Berdasarkan seluruh hasil penelitian serta kesimpulan yang ada, dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pelayanan yang dilakukan 2 (dua) kali dalam seminggu sebaiknya mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Desa Simba Raya. Karena waktu tersebut sangat terbatas untuk berinteraksi

dengan masyarakat dalam hal memberikan pelayanan yang maksimal.

2. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa Simba Raya yang sudah dapat dinilai baik perlu dipertahankan dan terus ditingkatkan demi kemajuan Desa Simba Raya kedepannya.
3. Pemberdayaan masyarakat yang semakin tepat guna dengan partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan lagi. Kegiatan masyarakat yang didirikan yaitu kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat Desa Simba Raya.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang khususnya bagian Tata Pemerintahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang perlu memberikan perhatian khusus kepada Desa Simba Raya dengan Kelurahan Kapuas Kiri Hulu yang sudah sejak lama terlibat konflik batas wilayah. Konflik tersebut perlu segera mendapatkan penyelesaian agar tercipta kondisi penataan desa yang baik dari kedua belah pihak yang bersengketa. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian konflik batas Desa Simba Raya Kecamatan Binjai Hulu dengan Kelurahan Kapuas Kiri Hulu Kecamatan Sintang diharapkan dapat melakukan koordinasi secara intensif agar permasalahan batas desa tersebut dapat segera diselesaikan.

## F. KETERBATASAN PENELITIAN

Keterbatasan dalam penelitian ini bahwa secara aplikatif teori Joko Widodo yang menekankan pada evaluasi hasil dengan indikator yang ditekankan pada tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan khususnya pemekaran desa, secara umum dapat diaplikasikan. Terkecuali dalam hal melakukan penilaian terhadap batas – batas wilayah yang secara normatif belum ditentukan.

## G. REFERENSI

### Buku:

Adisasmata, Raharjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Badjuri, Abdulkahar., dan Teguh Yuwono. 2003. *Kebijakan Publik, Konsep, dan Strategi*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Terjemahan Fakultas ISIPOL Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Ketaren, Nurlela. 2008. *Buku Ajar Administrasi Pembangunan*. Medan: Fisip Usu.

Hardiyansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.

Moenir. 2000. *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: Bina Aksara.

Nugroho, Riant D. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

----- . 2011. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Parsons, Wayne. 2011. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: CV Alfabeta.

Santosa, Pandji. 2008. *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: PT Refika Aditama.

Sedarmayanti. 2012. *Good Governance*. Bandung: CV Mandar Maju.

----- . 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang Baik)*. Bandung: Refika Aditama

Siagian, Sondang P. 2002. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Haji Masagung.

Sinambela, Lijan Poltak. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, Dan Implementasi*. Jakarta. PT.Bumi Aksara

Subarsono, AG. 2013. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

----- .2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model – Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.

Tjokrowinoto, Moeljarto. 2007. *Pembangunan: Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tohardi, Ahmad. 2011. *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan*. Pontianak: Prodi IP FISIP UNTAN.

Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.

Wirawan. 2011. *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*. Jakarta: Rajawali Pers.

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang nomor 6 tahun 2014  
Tentang Desa.

Undang-Undang nomor 23 tahun 2014  
Tentang pemerintahan daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  
Nomor 43 tahun 2014. Tentang peraturan  
pelaksanaan undang-undang Nomor 6  
Tahun 2014 tentang desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 28  
tahun 2006. Tentang pembentukan,  
penghapusan, penggabungan desa dan  
perubahan status menjadi kelurahan.

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang  
nomor 9 tahun 2007. Tentang pemekaran  
desa di Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten  
Sintang.

Keputusan Tim Pemekaran Desa Dak Jaya  
Nomor 1 Tahun 2007. Tentang Persetujuan

Usulan Pemekaran Desa Dak Jaya  
Kecamatan Binjai Hulu.

#### **Penelitian:**

Rachim, Ratri Furry Pustika. 2013. *Evaluasi Pemekaran Wilayah Kota Serang Ditinjau dari Kinerja Ekonomi dan Kinerja Pelayanan Publik Daerah*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Dewi, Lisa Agustina. 2012. *Evaluasi Dampak Pemekaran Wilayah Pada Aspek Kualitas Pelayanan di Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang*. Tirtayasa: Universitas Sultan Ageng.

Martyan, Doroteus. 2014. *Evaluasi Kebijakan Pemekaran Desa Gemba Raya di Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang*. Pontianak: Universitas Tanjungpura.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
**PENGELOLA JURNAL MAHASISWA**

Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124  
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>  
Email : [jurnalmhs@fisip.untan.ac.id](mailto:jurnalmhs@fisip.untan.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika universitas tanjungpura, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Vetronela Erdawati Qyki  
NIM / Periode Lulus : E42012035 / 2016  
Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI  
Email address / HP : [vetronelaqyki@gmail.com](mailto:vetronelaqyki@gmail.com) / 082358761749

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**EVALUASI KEBIJAKAN PEMEKARAN DESA SIMBA RAYA KECAMATAN BINJAI HULU  
KABUPATEN SINTANG**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- fulltext  
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.



Dr. Herwijaya Kusuma, M.A  
NIP. 196202141986031001

Dibuat di : Pontianak  
Pada Tanggal : September 2016

(Vetronela Erdawati Qyki)

## HALAMAN PENGESAHAN

### EVALUASI KEBIJAKAN PEMEKARAN DESA SIMBA RAYA KECAMATAN BINJAI HULU KABUPATEN SINTANG

VETRONELA ERDAWATI QYKI  
NIM. E42012035

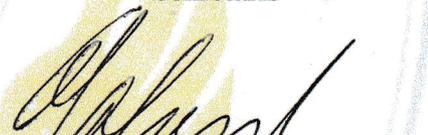
Dipertahankan di : Pontianak  
Pada Hari/Tanggal : Kamis / 25 Agustus 2016  
Waktu : 09.00 wib - selesai  
Tempat : Ruang Sidang Program Studi Ilmu Pemerintahan

#### Tim Penguji

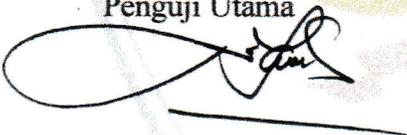
Ketua

  
Dr. H. Thamrin, MA  
NIP. 19600816 198503 1 004

Sekretaris

  
Ori Fahriansyah, S.IP, M.Si  
NIP. 19691122 200212 1 002

Penguji Utama

  
Dr. Sugito, M.Si  
NIP. 19550516 1986031 004

Penguji Pendamping

  
Ira Patriani, S.IP, M.Si  
NIP. 19761130 200312 2 001

Disahkan Oleh:  
Dekan FISIP Untan



Drs. Sukamto, M. Si

NIP. 19601008 198703 1 002



# KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

## UNIVERSITAS TANJUNGPURA

### FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124 Kotak Pos 1049

## BIODATA SARJANA BARU

### PROFIL PRIBADI

1 Periode Wisuda : 2016/2017 PERIODE I  
2 Nama Lengkap : VETRONELA ERDAWATI QYKI  
3 NIM : E42012035  
4 Tempat dan Tanggal Lahir : PONTIANAK, 19 JUNI 1994  
5 Jenis Kelamin : WANITA  
6 Status Perkawinan : BELUM MENIKAH  
7 Agama : KHATOLIK  
8 Pekerjaan : LAINNYA  
9 No. Hanphone : 082358761749  
10 Email : vetronelaqyki@gmail.com  
11 Alamat Rumah : JALAN KELAM AKCAYA 1 RT/RW: 07/09 KELURAHAN AKCAYA

### NO. REGISTRASI :

941d82a976bf2fcba550370d752f506e

### INFORMASI ORANG TUA

1 Nama Bapak / Ibu : SUKARDI, S.SOS / VERONIKA NURSIANA  
2 Pekerjaan Bapak / Ibu : SWASTA / RUMAH TANGGA  
3 Pendidikan Bapak / Ibu : S-1 / SLTA

### ASAL SLTA / MA

1 Propinsi : KALIMANTAN BARAT  
2 Kabupaten / Kota : KAB. SINTANG  
3 NPSN / Nama Sekolah : 30102513 | SMAN 3 SINTANG

### DATA DI UNIVERSITAS TANJUNGPURA

1 Fakultas : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
2 Jurusan / Prodi : ILMU PEMERINTAHAN / ILMU PEMERINTAHAN  
3 Tgl. Masuk & Angkatan : 01-09-2012 | 2012  
4 IPK / Score TUTEP : 3,72 | 423  
5 Tanggal Lulus : 25-08-2016  
6 Judul Skripsi :  
7 Tgl. Mulai Menulis : 03-02-2016  
8 Tgl. Selesai Menulis : 25-08-2016

**EVALUASI KEBIJAKAN PEMEKARAN DESA SIMBA RAYA KECAMATAN BINJAI HULU KABUPATEN SINTANG / THE EVALUATION OF EXPANSION POLICY IN SIMBA RAYA RURAL BINJAI HULU SUB-DISTRICT SINTANG REGENCY**



Pontianak, 13 - 10 - 2016

VETRONELA ERDAWATI QYKI

NIM. E42012035

### PERHATIAN :

1. Kesalahan pengisian biodata oleh Ybs, bukan tanggungjawab penulisan Ijasah, Transkrip Nilai dan SKPI
2. Pengisian biodata berdasarkan Ijasah terakhir dibuktikan dengan Fc Ijasah terakhir yang telah dilegalisir
3. Pas photo menggunakan pakai Sipil bagi pria dan pakai kebaya nasional / jas lengkap dengan latar belakang biru tua
4. Pembuatan Ijasah / Transkrip akan dilayani jika sudah di validasi oleh Subbag Pendidikan
5. Silahkan bergabung dalam group Ikatan Alumni UNTAN di FB : <https://www.facebook.com/groups/ikauntan>



E42012035